

InfoSAWIT®

INDONESIAN PALM OIL MAGAZINE



Follow us @



@infosawitcom

@Info SAWIT

Independence Day
Certificate Handover
Ceremony & Dinner



KOMITMEN SPKS AKAN MINYAK SAWIT BERKELANJUTAN

**MENDORONG EKONOMI
DESA MELALUI
PENINGKATAN
PRODUKTIVITAS PETANI
DAN SERTIFIKASI
KEBERLANJUTAN**

SABARUDIN
KETUA UMUM SPKS



DESEMBER 2024

ISSN 1978-9815



9 771978 981523

206

Sawit Store

ONE STOP PALM OIL STORE

<http://store.infosawit.com>

Dapatkan berbagai informasi tentang kelapa sawit dengan sekali **Klik!**

✓ **E-MAGZ**
(Bahasa & English)

✓ **BOOKLET**

✓ **NEWSWEEK**

✓ **E-DIRECTORY**



Follow Us:



@infosawit



@infosawit



Majalah infosawit

Subscribe & Ads

HP: 081284832789, 081287299959

Email: marketing@infosawit.com, sawit.magazine@gmail.com

www.infosawit.com | www.palmoilmagazine.com



Bumitama Gunajaya Agro Group



Bumitama Gunajaya Agro

Membangun Masyarakat Perkebunan yang Sejahtera dan Mandiri



Excellence Through Discipline

PETANI DAN PRINSIP SAWIT BERKELANJUTAN

Penerapan prinsip sawit berkelanjutan tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab perusahaan besar, tetapi juga melibatkan petani kelapa sawit swadaya. Meski menghadapi berbagai kendala, petani telah menunjukkan kemampuan untuk mendukung ekonomi pedesaan sekaligus menjaga lingkungan. Salah satu pendukung utama langkah ini adalah Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), organisasi yang berkomitmen terhadap praktik sawit berkelanjutan.

Sejak berdiri pada 2006, SPKS telah menjadi pelopor di antara petani sawit swadaya dalam menerapkan kebijakan No Deforestation, Peat, and Exploitation (NDPE). Dengan anggota lebih dari 58.000 petani yang tersebar di 13 kabupaten di Sumatera dan Kalimantan, SPKS memberikan dukungan melalui peningkatan kapasitas, akses kelembagaan, serta dukungan keuangan dan kebijakan.

Namun, tantangan besar tetap ada. Petani sawit swadaya seringkali kekurangan sumber daya untuk memenuhi standar keberlanjutan yang ketat. Masalah akses ke teknologi, pembiayaan, dan pasar global menjadi hambatan yang perlu diatasi. Dalam hal ini, peran pemerintah dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung petani kecil.

Petani kelapa sawit swadaya bukan hanya pelengkap dalam rantai pasok, tetapi juga pilar penting dalam upaya menjaga keberlanjutan industri sawit nasional. Dengan dukungan kelembagaan seperti SPKS, petani memiliki peluang untuk bertransformasi

menjadi pelaku usaha yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.

Penerapan prinsip sawit berkelanjutan oleh petani adalah langkah strategis untuk membuktikan bahwa keberlanjutan bukan sekadar jargon, melainkan kenyataan yang mendukung kesejahteraan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kolaborasi semua pihak, namun hasilnya akan menentukan masa depan industri kelapa sawit Indonesia.

Nah, guna mengetahui lebih lanjut mengenai peran dan dampak yang telah dilakukan petani kelapa sawit swadaya terhadap ekonomi dan lingkungan, pembaca bisa melihatnya pada Rubrik Fokus kami kali ini.

Di sisi lain, isu-isu global seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) semakin menekan pelaku industri sawit, termasuk petani kecil. Penundaan penerapan kebijakan ini selama satu tahun memang memberikan sedikit kelonggaran, tetapi waktu ini harus dimanfaatkan untuk mempersiapkan diri secara maksimal.

Lantas bagaimana para pelaku sawit menyikapi penundaan kebijakan ini? Pembaca bisa melihatnya pada Rubrik Teropong. Selain dua isu tersebut kami juga mengangkat beberapa isu sawit yang menarik lainnya.

Sebab itu tidak berpanjang kata kami persilahkan pembaca melihat lembar demi lembar sajian kami kali ini. Selamat membaca.

Salam Redaksi.

Pemimpin Umum/
Pemimpin Redaksi
Ignatius Ery Kurniawan

Pemimpin Usaha
Yustinus Eryanto Setiawan

Dewan Redaksi
Prof. Dr. Bungaran Saragih
Prof. Dr. Erliza Hambali
Prof. Dr. Purwiyatno Hariyadi
Ir. Derom Bangun
Kris Hadisoebroto
Seman S. Suhenda
F. Rahardi
Edi Suhardi
Maruli Gultom

Redaktur Pelaksana
Atep Yulianto Irawan

Jurnalis
Daniel Tampubolon
Thomas Fatma
Winda Stephani Aritonang
Kanisius Paskalis

Desain & Layout
Samsudin

Website
Prasetya Widodo

Fotografer
Ferdinand Ernando Novialdi

Staff Usaha
Arini Dwi Putri
Enok Kartika

Tim Kreatif
Islahudin
Almas Q

Penerbit
PT. Mitra Media Nusantara

Alamat Redaksi/Marketing
Jl. Raya Leuwinanggung No. 55
Rt 003/03 Kel. Leuwinanggung
Kec. Tapos-Depok, Jawa Barat 16456
Telp. 021-22988335
Hp. 0812 872 99959 (Redaksi)

website
www.infosawit.com
www.palmoilmagazine.com

e-mail
sawit.magazine@gmail.com
redaksi@infosawit.com
marketing@infosawit.com

ISSN : 1978-9815

Didukung oleh :



Redaksi menerima tulisan atau berita seputar kelapa sawit (industrial crops). Artikel sebaiknya disertai dengan foto pendukungnya, dikirim via email, fax atau pos ke redaksi *InfoSAWIT*. Redaksi berhak menyunting naskah sejauh tidak mengubah isinya.

DAFTAR ISI

10 FOKUS



Cover : Tim InfoSAWIT
Foto : SPKS



KOMITMEN SPKS AKAN MINYAK SAWIT BERKELANJUTAN

ADVERTISER INDEX

Back Cover 1
InfoSAWIT Magazine
<https://www.store.infosawit.com>

Back Cover 2
Bumitama Gunajaya Agro (BGA)
Perusahaan Perkebunan dan pabrik Kelapa Sawit

Back Cover 5
VEGA
Whatever you want to measure, whatever frequency you use – VEGAPULS 6X can handle it
www.vega.com/radar

Back Cover 6
InfoSAWIT E-Magazine
<https://www.store.infosawit.com>

- 4 **CATATAN REDAKSI**
- 7 **MILESTONE INFOSAWIT**
- 8 **EDITORIAL**
Minyak Sawit Berkelanjutan Menjadi Modal Sosial Masyarakat
- 28 **AGENDA & LINTAS**
- 29 **HARGA RATA-RATA CPO CIF ROTTERDAM 1972-2024**
- 30 **INFO HARGA**

24
TEROPONG

ANGIN SEGAR PENUNDAAN EUDR



Pemimpin Redaksi InfoSAWIT, Ignatius Ery Kurniawan (kiri), bersama dengan Ketua Umum Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI), Delima Hasri Azahari (kanan), disela-sela sebuah acara Seminar di Bogor, akhir November 2024.
Foto: InfoSAWIT

KOMENTAR

B40: LANGKAH STRATEGIS MENUJU NET ZERO EMISSION 2060



Dok. Istimewa

Komitmen Pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission pada 2060 mendapat dorongan signifikan melalui kebijakan mandatori B40. Dengan target penyaluran 16,08 juta kiloliter biodiesel pada 2025, kebijakan ini mencerminkan upaya serius dalam mendorong transisi energi terbarukan. Pendanaan sebesar Rp37,5 triliun yang berasal dari BPDPKS menunjukkan keberlanjutan sumber pembiayaan untuk agenda besar ini.

Pemerintah telah mempersiapkan berbagai aspek teknis dan infrastruktur, seperti evaluasi kapasitas produksi biodiesel, kesiapan moda angkut, hingga uji teknis melalui road test sejauh 50.000 kilometer. Semua langkah ini bertujuan memastikan implementasi berjalan lancar.

Selain itu, analisis keuangan menunjukkan dana BPDPKS cukup untuk mendukung program ini. Kebijakan B40 bukan hanya langkah teknis, melainkan simbol kolaborasi multi-pihak dalam membangun masa depan energi yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Dida Gardera

Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kemenko Perekonomian

MILESTONE InfoSAWIT 2007-2024



NOVEMBER 2022

Menerbitkan Buku:

- BUKU PANDUAN SAWIT : PERKEBUNAN SAWIT RAKYAT
ISBN : 978-623-09-0957-3
- PALM OIL HANDBOOK : SMALLHOLDER'S PALM OIL PLANTATIONS
ISBN : 978-623-09-2474-3

SEPTEMBER 2021

Mengadakan SawitFest, guna menambah literasi sawit yang lebih baik kepada generasi muda, sekaligus sebagai upaya dalam memberikan keseimbangan informasi tentang kelapa sawit, sebanyak 2.394 peserta lomba baik kategori desain poster, fotografi, penulisan esai dan video kreatif, turut serta dalam kegiatan sawit Fest 2021 dengan jumlah total 3.196 karya.

AGUSTUS 2019

Membungkus acara **DISKUSI SAWIT BERKELANJUTAN** dan **DISKUSI SAWIT BAGI NEGERI** menjadi acara FGD Sawit Berkelanjutan

OKTOBER 2018

- Menerbitkan website pertanian dan perkebunan www.agricom.id
- Mengadakan acara **DISKUSI SAWIT BERKELANJUTAN**

APRIL 2012

Bekerjasama dengan Inapalm mengadakan Diskusi di Riau, 26 April 2012, Labersa Grand Hotel, Riau.

Juli 2011

Mengadakan Diskuis Moratorium Mengancam Minyak Sawit Lestari, 20 JULI 2011, di Hotel Borobudur, Jakarta.

Oktober 2010

- Pertama kalinya mengadakan diskusi bertajuk Masa Depan Minyak Sawit Sustainable di Hotel Borobudur, Jakarta, pada 28 Oktober 2010
- Mengadakan Forum Bisnis InfoSAWIT, pada 15 November 2010, Hotel Borobudur, Jakarta.
- Bersama GAPKI menerbitkan **Booklet Petani Plasma Sawit Berbicara Fakta**

November 2008

- Media Partner GAPKI Conference untuk pertama kalinya.
- Media Partner RT RSPO, untuk pertama kalinya.



NOVEMBER 2024

Telah Terbit selama 17 Tahun



NOVEMBER 2021

Menerbitkan website:

- InfoSAWIT Sumatera
- InfoSAWIT Kalimantan
- InfoSAWIT Jawa
- InfoSAWIT Sulawesi



APRIL 2020

Menerbitkan **InfoSAWIT ENGLISH**, sebuah platform website InfoSAWIT berbahasa Inggris.

DESEMBER 2018

Mengadakan acara **DISKUSI SAWIT BAGI NEGERI**

AGUSTUS 2014

Menerbitkan website berbahasa Inggris www.palmoilmagazine.com

DESEMBER 2011

- Bersama Kementerian Perindustrian menerbitkan **Booklet Profile of Palm Cooking Oil Industry**
- Bersama Kementerian Perindustrian menerbitkan **Booklet INDONESIAN PALM OIL DOWNSTREAM INDUSTRY**

November 2010

Bersama Tim Advokasi Minyak Sawit Indonesia - Dewan Minyak Sawit Indonesia (TAMSI-DMSI) menerbitkan **Buku Fakta Kelapa Sawit Indonesia**



November 2008

- Media Partner GAPKI Conference untuk pertama kalinya.
- Media Partner RT RSPO, untuk pertama kalinya.

November 2007

- InfoSAWIT resmi berdiri memiliki VISI: Menjadi Perusahaan Media Informasi yang Terpercaya dan Misi: Menjadi Referensi Industri Kelapa Sawit Nasional.
- Edisi Cetak pertama terbit
- Webiste infosawit: www.infosawit.com mulai aktif
- Peresmian InfoSAWIT pada acara ICOPE di Nusa Dua Bali



Ignatius Ery Kurniawan
Pemimpin Redaksi

MINYAK SAWIT BERKELANJUTAN MENJADI MODAL SOSIAL MASYARAKAT

PENERAPAN PRINSIP DAN KRITERIA BERKELANJUTAN YANG BERLAKU UNIVERSAL, MENJADI SYARAT UTAMA AKAN KEBERADAAN MINYAK SAWIT BERKELANJUTAN. BERASAL DARI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, KEBERADAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN DIHARAPKAN BANYAK ORANG, DAPAT MEMBERIKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI BERKELANJUTAN, DAPATKAH MENJADI MODAL SOSIAL BAGI MASYARAKAT?

Pemikiran mengenai modal sosial telah berkembang sejak awal abad ke-20, ketika seorang pendidik asal Amerika Serikat, Lyda Judson Hanifan, memperkenalkan konsep tersebut. Dalam esainya, *The Rural School Community Centre*, Hanifan menjelaskan bahwa modal sosial bukanlah kekayaan materi seperti uang atau properti, melainkan aset kiasan yang menjadi pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat. Ia mencakup kepercayaan, kemauan baik, hubungan sosial yang erat, dan kerja sama antarindividu dan komunitas.

Konsep modal sosial ini relevan dalam konteks keberlanjutan, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit. Di Indonesia, kelapa sawit telah menjadi komoditas strategis yang menopang perekonomian nasional selama lebih dari seabad. Namun, tantangan untuk menjaga keberlanjutan tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi, tetapi juga pada sinergi sosial dan lingkungan.



Dok. Sawit Fest 2021/ Febyola Indah

Hanifan menekankan bahwa modal sosial lebih dari sekadar hasil; ia adalah proses berkelanjutan yang tumbuh dari interaksi sosial. Dalam perkebunan kelapa sawit, keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan—atau dikenal sebagai *triple bottom line*—menjadi elemen yang saling mendukung. Keberadaan modal sosial dapat menjadi penggerak utama keberlanjutan, menciptakan kerangka kerja yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dari petani kecil hingga perusahaan besar.

Keberhasilan pembangunan berkelanjutan dalam sektor ini bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat desa. Contohnya, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi solusi untuk membantu petani kecil meremajakan tanaman mereka. Namun, program ini hanya akan efektif jika petani memiliki modal sosial yang kuat, seperti kepercayaan dalam kelompok tani, kemauan untuk berkolaborasi, dan jaringan kelembagaan koperasi yang solid.

Perkebunan kelapa sawit telah mengubah wajah daerah pelosok di Indonesia. Desa-desa yang sebelumnya terpencil dan tertinggal perlahan berkembang menjadi pusat ekonomi berkat keberadaan perkebunan. Contohnya adalah keluarga Amran, seorang petani sawit mandiri dengan lahan 2,5 hektare. Dari kebunnya, ia mendapatkan penghasilan bulanan Rp3-5 juta, belum termasuk tambahan Rp2-5 juta dari usaha kelontongnya yang didanai oleh tabungan hasil berkebun.

Kisah Amran mencerminkan bagaimana perkebunan sawit tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi tetapi juga menciptakan modal sosial. Dengan istri yang berprofesi sebagai guru PNS dan dua anak yang menempuh pendidikan di Yogyakarta, keluarga ini menikmati

“Melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, sektor kelapa sawit dapat menjadi contoh bagaimana modal sosial menjadi fondasi bagi pembangunan yang lebih adil dan seimbang”

kesejahteraan yang terwujud berkat kombinasi dari hasil berkebun dan pemberdayaan sosial.

Di luar petani mandiri, keluarga petani plasma dan karyawan perusahaan perkebunan juga merasakan manfaat serupa. Pendapatan yang stabil dari sektor ini memutar roda ekonomi desa, mendorong aktivitas komunal, dan memperkuat solidaritas sosial.

Namun, tantangan utama yang dihadapi petani kecil adalah peremajaan tanaman sawit. Meskipun kelapa sawit memiliki siklus produktivitas hingga 25 tahun, banyak petani kesulitan menyisihkan dana untuk peremajaan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan modal sosial melalui pembentukan kelompok tani yang mampu mengelola tabungan bersama atau akses ke program pemerintah seperti PSR.

Tanpa peremajaan, produktivitas kebun bisa menurun, yang pada gilirannya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan perkebunan kelapa sawit tidak dapat dicapai tanpa modal sosial yang kuat. Petani membutuhkan dukungan kelembagaan, pelatihan, dan akses ke pendanaan untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang.

Perkebunan kelapa sawit memiliki potensi besar untuk menjadi modal sosial bagi masyarakat desa. Seperti yang dijelaskan Hanifan, modal sosial

tumbuh dari proses interaksi yang terus menerus. Dengan memperkuat kepercayaan, kolaborasi, dan jaringan sosial, sektor ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas.

Langkah ini memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Pemerintah perlu mendorong kebijakan yang mendukung pemberdayaan petani, seperti memperluas jangkauan PSR atau membentuk koperasi yang efisien. Perusahaan perkebunan harus memprioritaskan program tanggung jawab sosial yang berfokus pada pemberdayaan petani dan konservasi lingkungan.

Sementara itu, masyarakat desa perlu melihat perkebunan sawit sebagai aset kolektif yang harus dikelola secara bijak. Dengan modal sosial yang kokoh, mereka dapat menghadapi tantangan seperti peremajaan tanaman dan tekanan pasar global, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Keberlanjutan sektor kelapa sawit di Indonesia bergantung pada kemampuan untuk memadukan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Modal sosial, sebagaimana digagas oleh Hanifan, adalah kunci untuk mencapai tujuan ini. Perkebunan kelapa sawit tidak hanya memberikan keuntungan materi, tetapi juga membangun jaringan kepercayaan dan kerja sama yang memperkuat komunitas.

Melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, sektor kelapa sawit dapat menjadi contoh bagaimana modal sosial menjadi fondasi bagi pembangunan yang lebih adil dan seimbang. Dengan dukungan yang tepat, sektor ini dapat terus memberikan manfaat bagi generasi mendatang, sekaligus menjaga keseimbangan ekologi dan sosial. semoga. 



Dok. SPKS untuk InfoSAWIT/Petani sawit anggota SPKS raih sertifikasi RSPO berkelanjutan di Bangkok, Thailand pada Minggu (10/11/2024).

KOMITMEN SPKS AKAN MINYAK SAWIT BERKELANJUTAN

>> Ignatius Ery Kurniawan

SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT (SPKS) MEMILIKI KOMITMEN TINGGI AKAN MINYAK SAWIT BERKELANJUTAN. BERBAGAI KARUT MARUT YANG TERJADI PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MILIK PETANI MANDIRI, MENDORONG PARA PETANI DARI BERBAGAI DAERAH GUNA BERHIMPUN DALAM ORGANISASI PETANI MANDIRI SPKS.

Sejak didirikan awal 2005 silam, SPKS merasakan minimnya perhatian para pemangku kepentingan terhadap perkebunan kelapa sawit milik petani

mandiri. Keprihatinan SPKS terhadap produktivitas perkebunan rakyat yang masih rendah, kapasitas pengelolaan kebun yang masih tradisional, pengembangan teknologi pertanian

yang kurang baik, posisi tawar petani yang lemah, infrastruktur kebun petani yang jauh dari standar praktik budidaya terbaik (*Good Agricultural Practices/GAP*) dan adanya konflik

sosial hingga pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta kerusakan lingkungan yang cukup masif terjadi. Sehingga mendorong SPKS berkomitmen penuh akan adanya minyak sawit berkelanjutan.

Berbadan hukum nasional resmi sejak 2012 silam, SPKS terus melakukan pengorganisasian para petani kelapa sawit mandiri yang tersebar di berbagai daerah sentra perkebunan kelapa sawit. Konsolidasi para petani dilakukan, melalui pembentukan kelompok-kelompok petani hingga menyatukan dalam organisasi SPKS yang berdiri di berbagai daerah. “Kelembagaan petani kelapa sawit sangat penting, dalam mengelola perkebunan kelapa sawitnya,” kata Ketua Umum SPKS, Sabarudin.

Hingga Tahun 2024 ini, SPKS telah memiliki anggota sebanyak 76.700 orang yang tersebar di 10 Provinsi sentra perkebunan kelapa sawit, yang berada di 21 Kabupaten dan 419 Desa. Kegiatan SPKS selalu mendukung perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit milik petani supaya dapat mandiri dan senantiasa berkomitmen akan praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan.

Komitmen akan minyak sawit berkelanjutan ini, dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan melalui pendampingan kelompok tani dan mendorong pembentukan kelembagaan petani diberbagai desa. Alhasil, petani mandiri terus bertumbuh dan bertambah besar di Indonesia.

Menurut Sabarudin, keberadaan petani mandiri kelapa sawit di Indonesia, memiliki peranan penting bagi kemajuan perkebunan kelapa sawit nasional. Menurutnya,

“Kelembagaan petani kelapa sawit sangat penting, dalam mengelola perkebunan kelapa sawitnya”

Sabarudin

Ketua Umum SPKS



kemandirian petani dalam mengelola perkebunan kelapa sawit berlandaskan prinsip dan kriteria berkelanjutan akan menghasilkan produktivitas tinggi hasil panennya, sehingga petani mandiri kelapa sawit akan bertambah sejahtera.

“Komitmen petani kelapa sawit anggota SPKS sangat tinggi terhadap praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan”, ujar Sabarudin, lebih lanjut, “Produktivitas tinggi yang didapat dari hasil panennya, akan mendorong kesejahteraan hidup petani mandiri menjadi lebih baik di masa depan”.

Sebab itu, Sabarudin menjelaskan, keberadaan SPKS sebagai organisasi petani mandiri kelapa sawit di Indonesia, membutuhkan banyak dukungan dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Dukungan Pemerintah Indonesia terhadap petani mandiri kelapa sawit yang banyak berada di sentra perkebunan kelapa sawit, senantiasa dibutuhkan, guna mendorong kesejahteraan hidupnya.

“Komitmen petani mandiri kelapa sawit akan minyak sawit berkelanjutan senantiasa membutuhkan dukungan pemerintah, supaya kesejahteraan hidup petani dapat meningkat”, tandas Sabarudin menegaskan.

Senada dengan Sabarudin, juga

diungkapkan pihak pemerintah, seperti kerjasama yang dilakukan dengan Komisi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Sebagai sertifikasi berkelanjutan yang diwajibkan Pemerintah Indonesia, bagi perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Maka kerjasama percepatan sertifikasi ISPO, juga dilakukan pemerintah bersama SPKS.

Menurut sekretariat ISPO, Herdrajat Natawijaya, keberadaan sertifikasi ISPO bagi petani mandiri kelapa sawit sangat penting, lantaran dengan melakukan praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan maka kehidupan petani mandiri dapat menjadi lebih baik. Sebab itu, melalui kerjasama dengan SPKS, maka kegiatan sosialisasi percepatan ISPO dapat dilakukan secara bersama.

“Pentingnya aspek ekonomi, sosial dan lingkungan bagi petani mandiri akan menjadi kunci sukses kebun sawit yang dikelolanya”, ujar Herdrajat, saat melakukan kegiatan bersama SPKS di Kabupaten Siak, Riau, pada pertengahan tahun 2024.

Sebagai informasi, sosialisasi percepatan sertifikasi ISPO terus dilakukan SPKS di berbagai daerah. Melalui kerjasama erat dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian dan Lembaga Pemerintah terkait

seperti BPN, BAKOSTRANAL dan BPDPKS. Kerjasama erat dengan Pemerintah Daerah (Pemda) juga telah dilakukan bersama Pemda Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Labuan batu, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Paser Penajam dan sebagainya.

Selain mendorong percepatan sertifikasi ISPO, SPKS sebagai organisasi petani juga turut mendorong para anggota SPKS guna melakukan sertifikasi RSPO. Keberadaan sertifikasi berkelanjutan ini, dapat membantu petani mandiri dalam melakukan praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan secara baik dan benar di masa depan.

Kolaborasi Petani Mandiri Kelapa Sawit.

Keberadaan petani mandiri kelapa sawit, juga membutuhkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan lainnya. Menurut Sabarudin, SPKS senantiasa melakukan kolaborasi kerjasama dengan para pemangku kepentingan lainnya. Guna memastikan serapan hasil panen petani mandiri, maka kemitraan bersama perusahaan perkebunan menjadi bagian dari kebutuhan bersama mengelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

“Kolaborasi petani mandiri bersama perusahaan perkebunan kelapa sawit juga menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan”, papar Sabarudin.

Kolaborasi petani mandiri dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, juga menjadi konsen bagi perusahaan



Dok. SPKS untuk InfoSAWIT/Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sabarudin (kanan), bertemu dengan Direktur Utama PalmCo (PTPN Perkebunan Holding sawit) Jatmiko Santosa, (kedua dari kanan) mendiskusikan kemitraan antara anggota SPKS dengan PalmCo yang beberapa kebun anggota SPKS memiliki kedekatan dengan PalmCo.

“Upaya perbaikan pengelolaan kebun sawit petani mandiri, dapat bekerjasama dengan perusahaan perkebunan yang dikelola PalmCo”

Jatmiko Santosa
Direktur Utama PalmCo

perkebunan kelapa sawit nasional. Seperti yang diungkapkan Direktur Utama PalmCo, Jatmiko Santosa, akan keberadaan kerjasama dengan petani mandiri kelapa sawit yang berada di sekitar perkebunan kelapa sawit milik PalmCo.

Menurut Jatmiko, keberadaan petani mandiri kelapa sawit dapat bekerjasama dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit nasional. Lantaran, keberadaan perkebunan kelapa sawit milik petani mandiri kelapa sawit, dapat berkolaborasi bersama guna melakukan praktik

budidaya terbaik dan berkelanjutan.

“Upaya perbaikan pengelolaan kebun sawit petani mandiri, dapat bekerjasama dengan perusahaan perkebunan yang dikelola PalmCo”, kata Jatmiko menjelaskan kepada **InfoSAWIT**. Jelasnya, kolaborasi petani mandiri bersama perkebunan kelapa sawit, dapat dilakukan secara terbuka dan dilakukan bersama, sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya.

Sebagai informasi, kolaborasi perusahaan perkebunan bersama petani kelapa sawit, selalu didorong Pemerintah Indonesia, guna membangun perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. Keberadaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, juga menjadi bagian dari keberhasilan Indonesia dalam mengelola perkebunan kelapa sawit secara bertanggung jawab, berlandaskan prinsip dan kriteria berkelanjutan yang berlaku secara universal. ☒



Dok. SPKS untuk InfoSAWIT/Foto bersama pengurus SPKS Kabupaten Sanggau.

7 AKSI SPKS WUJUDKAN MINYAK SAWIT BERKELANJUTAN

>> Tim InfoSAWIT

INDONESIA SEBAGAI NEGARA PRODUSEN NOMOR SATU DUNIA, MENGHASILKAN PRODUKSI CPO SEKITAR 50 JUTA TON ATAU MENGUSAI SEKITAR 60 PERSEN PRODUKSI CPO DUNIA. KEBERADAAN PRODUKSI CPO INI, MEMILIKI KEUNTUNGAN BESAR DI SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT. TERUTAMA PETANI KELAPA SAWIT YANG MENGELOLA LUAS LAHAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SEKITAR 40 PERSEN LEBIH DAN TURUT MENIKMATI KEUNTUNGAN DARI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG DIKELOLANYA.

Posisi Indonesia sebagai produsen CPO dan produk turunan terbesar dunia, tidak bisa menghindari adanya kebutuhan konsumen global akan adanya minyak sawit berkelanjutan. Lantaran, keberadaan pasar global kian menyaratkan adanya minyak sawit berkelanjutan termasuk suplai dari Indonesia. Sebab itu, perkebunan kelapa sawit harus berbenah guna melakukan praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan untuk menghasilkan minyak sawit berkelanjutan.

Sebagai organisasi petani kelapa sawit mandiri, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) memiliki komitmen yang kuat akan keberlanjutan. Termasuk komitmen kuat akan NOL DEFORESTASI yang dilakukan para anggota SPKS yang berada di sentra-sentra perkebunan kelapa sawit Indonesia. Keberadaan anggota SPKS juga senantiasa melakukan berbagai perbaikan, guna menghasilkan minyak sawit berkelanjutan bagi pasar global termasuk pasar Indonesia.

Bagaimana kiprah SPKS dalam

melakukan pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan mengimplementasikan komitmen akan nol deforestasi di Indonesia? Tentu menjadi banyak pertanyaan bagi sebagian orang, lantaran sebagai organisasi petani kelapa sawit mandiri, banyak keterbatasan yang dimilikinya. Namun, berbagai keterbatasan yang dimiliki SPKS, senantiasa menjadi tantangan dan peluang guna melakukan banyak perbaikan pengelolaan perkebunan kelapa sawitnya.

Para anggota SPKS memiliki target yang ditetapkan bersama guna melakukan produksi minyak sawit berkelanjutan. Komitmen kuat akan minyak sawit berkelanjutan, menjadi bagian dari semua anggota SPKS guna menerapkan prinsip dan kriteria berkelanjutan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang berlaku mandatori bagi perkebunan kelapa sawit di Indonesia termasuk milik petani kelapa sawit.

Lantaran mandatori atau wajib dilakukan, maka para anggota SPKS senantiasa menerapkan prinsip dan kriteria berkelanjutan dalam mengelola perkebunan kelapa sawitnya. Terlebih, anggota SPKS juga memiliki komitmen kuat akan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang secara sukarela juga dilakukannya. Pada periode Tahun 2019 hingga 2024, SPKS telah berhasil mendorong sertifikasi perkebunan kelapa sawit milik anggotanya sebanyak 10 Koperasi petani, dengan total luas lahan perkebunan kelapa sawit mencapai 4.983 hektar dan melibatkan 2.385 petani kelapa sawit mandiri.

Menurut Ketua Umum SPKS, Sabarudin, keberhasilan anggota SPKS melakukan sertifikasi keberlanjutan ISPO dan RSPO merupakan implementasi dari komitmen kuat akan minyak sawit berkelanjutan yang dilakukan semua anggotanya. Peralnya, berbagai perbaikan yang dilakukan menjadi pijakan baru bagi anggota SPKS dalam mengelola kebun sawitnya.

“SPKS berkomitmen penuh untuk mendukung sertifikasi sawit berkelanjutan di Indonesia”, kata Sabarudin, lebih lanjut, “Sebagai organisasi tani pelopor sertifikasi ISPO guna mendukung Pemerintah akan capaian target sawit berkelanjutan di



“SPKS telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produktivitas dan produksi sawit rakyat melalui pelatihan praktik budidaya yang baik (GAP) kepada petani atau pekebun sawit rakyat”

Ardi Praptono
Direktur SALMA Kementan

Indonesia”.

SPKS juga memiliki peta jalan bagi para anggotanya, supaya terlibat langsung dalam melakukan produksi minyak sawit berkelanjutan berlandaskan prinsip dan kriteria berkelanjutan universal, guna memenuhi kebutuhan pasar global. Sebab itu, sebagai organisasi petani kelapa sawit mandiri, SPKS memiliki visi untuk melakukan transformasi berkelanjutan dari petani kecil, masyarakat lokal atau masyarakat adat sebagai petani sawit untuk memproduksi sawit berkelanjutan.

Kendati tidaklah mudah dalam menerapkan prinsip dan kriteria berkelanjutan bagi petani kelapa sawit mandiri, namun berkat kerja keras dan ketekunan para anggota SPKS, maka sebagian anggota SPKS telah berhasil mendapatkan sertifikasi ISPO dan RSPO. Tentunya, keberhasilan mendapatkan sertifikasi ISPO dan RSPO ini, juga merupakan hasil kerja bersama para pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah pusat dan daerah, asosiasi sawit, organisasi masyarakat dan dukungan pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang senantiasa berkolaborasi bersama SPKS.

Keberadaan SPKS sebagai

organisasi petani sawit kelapa sawit yang banyak melakukan sosialisasi ISPO dan pelatihan praktik budidaya terbaik bagi petani mandiri kelapa sawit, mendapatkan respon dan apresiasi dari Kementerian Pertanian, Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma (SALMA). Direktur SALMA Kementan, Ardi Praptono, memberikan apresiasi terhadap SPKS yang selama ini berperan aktif dalam melakukan sosialisasi ISPO.

Menurut Ardi, sosialisasi ISPO yang dilakukan SPKS menunjukkan peran aktifnya dalam sosialisasi ISPO agar sawit rakyat dapat berkelanjutan dan keberterimaan sawit rakyat semakin baik kedepannya. “SPKS telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produktivitas dan produksi sawit rakyat melalui pelatihan praktik budidaya yang baik (GAP) kepada petani atau pekebun sawit rakyat”, kata Ardi kepada **InfoSAWIT** melalui pesan *Whatsapp*.

Keberadaan sawit rakyat kedepan, diharapkan Ardi dapat menjadi lebih maju, melalui berbagai kegiatan yang akan dilakukan SPKS. Menurutnya, organisasi petani sawit seperti SPKS akan semakin berkembang dan maju di masa depan. Kedepan, Direktorat yang dipimpinnya, juga akan melanjutkan kerjasama yang

telah dirintis selama ini. “*Insy Allah* berlanjut, walau dengan keterbatasan, mengingat banyak pemotongan”, jelas Ardi.

Menerapkan Praktik Budidaya Terbaik dan Berkelanjutan.

SPSK juga mendorong kerjasama dari anggotanya guna menerapkan prinsip dan kriteria berkelanjutan melalui kesadaran tinggi para anggotanya. Berbagai aksi yang dilakukan SPKS melalui berbagai kegiatannya seperti membangun komitmen petani, pemetaan dan pendataan petani, membangun kelembagaan petani, pelatihan praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan, sertifikasi keberlanjutan ISPO dan RSPO, menghubungkan keberadaan petani kelapa sawit mandiri dengan konsumen secara langsung dan restorasi ekosistem.

Berikut ulasan lengkap akan sepaik terjang SPKS dalam mendorong petani kelapa sawit mandiri dalam menerapkan prinsip dan kriteria berkelanjutan hingga mendapatkan sertifikasi ISPO dan RSPO:

1. Membangun Komitmen Keberlanjutan Petani Kelapa Sawit Mandiri

Kesadaran memproduksi minyak sawit berkelanjutan di kalangan petani kelapa sawit terbilang masih sangat rendah, terkadang petani dianggap tidak mampu mengikuti cara produksi sawit berkelanjutan sesuai dengan standar sertifikasi. Kendati belum mampu mengikuti standar keberlanjutan ISPO atau RSPO, hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) petani, juga masih di beli oleh Perusahaan. Alhasil, banyak anggapan petani mengenai prinsip dan kriteria keberlanjutan, belum menjadi kewajiban yang harus dilakukannya.



Dok. SPKS untuk InfoSAWIT/SPKS Membangun Komitmen Keberlanjutan Petani Kelapa Sawit Mandiri

Kendati, ada sebagian petani kelapa sawit mandiri yang sudah mengerti akan pentingnya minyak sawit berkelanjutan.

SPKS menyadari akan adanya ketimpangan pemahaman akan keberadaan minyak sawit berkelanjutan tersebut. Kehidupan petani sawit mandiri yang banyak berada di pelosok-pelosok desa, sangat minim informasi dan pengetahuan akan minyak sawit berkelanjutan. Hal tersebut menjadi tantangan awal bagi SPKS untuk memberikan edukasi dan pembelajaran bersama kepada petani kelapa sawit mandiri akan pentingnya melakukan praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan.

Berikutnya, tantangan menghasilkan minyak sawit berkelanjutan berasal dari kesadaran dan komitmen para petani kelapa sawit mandiri. Sebab, masih terbersit dalam benak petani kelapa sawit mandiri akan besarnya kesulitan hidup, sehingga petani sawit seringkali berpikir akan untung dan rugi apabila melakukan praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan berlandaskan

prinsip dan kriteria berkelanjutan.

Berebakal kerja keras dan kemauan baik dari petani kelapa sawit mandiri, maka mulai Tahun 2015, SPKS terus melakukan diskusi dan sosialisasi secara berkelanjutan bagi para petani kelapa sawit mandiri yang menjadi anggota SPKS di berbagai daerah. Selanjutnya, pengetahuan dan informasi sawit dari sisi kebijakan pemerintah, perkembangan pasar global dan nasional, permintaan konsumen akan minyak sawit berkelanjutan, serta harmonisasi sosial dan lingkungan perkebunan kelapa sawit menjadi bagian dari pendidikan yang diberikan kepada petani kelapa sawit mandiri secara terus menerus.

Alhasil, petani kelapa sawit mandiri anggota SPKS mulai memiliki kesadaran akan pentingnya melakukan prinsip dan kriteria berkelanjutan di kebun sawitnya. Terlebih, petani kelapa sawit mandiri juga mulai menyadari akan keterlibatan mereka dalam menyuplai kebutuhan pasar global akan produksi minyak sawit berkelanjutan. Kemudian, timbul peran akan tanggung jawab petani kelapa sawit mandiri yang



Dok. SPKS untuk InfoSAWIT/Gandeng Kementerian ATR, SPKS Luncurkan Pilot Project Pemetaan Perkebunan.



Dok. SPKS untuk InfoSAWIT/penyerahan sertifikat SHM hasil Kerjasama SPKS dan ATR/BPN

bermuara kepada komitmen akan produksi minyak sawit berkelanjutan bagi dunia.

Prinsip dan Kriteria berkelanjutan yang menjadi syarat bagi perkebunan kelapa sawit, mulai diterapkan petani kelapa sawit mandiri anggota SPKS sejak Tahun 2019. Setelah menerapkan prinsip dan kriteria berkelanjutan, menjalani banyak dinamika pada pelaksanaannya, maka mulai Tahun 2023 hingga 2024, beberapa koperasi petani kelapa sawit mandiri anggota SPKS mulai mendapatkan sertifikasi berkelanjutan ISPO dan RSPO.

Komitmen kuat akan keberlanjutan yang menjadi bagian dari tanggung jawab petani kelapa sawit mandiri ini, merupakan bagian tak terpisahkan dari kesadaran akan regulasi yang diterapkan pemerintah berdasarkan peraturan ISPO dalam Perpres 44 tahun 2020. Kemauan kuat dari petani kelapa sawit mandiri ini, dapat menjadi contoh kepada petani lainnya, saat mulai menerapkan standar sawit berkelanjutan di perkebunan kelapa sawitnya.

2. Melakukan Pemetaan dan Pendataan Kebun Sawit Petani Mandiri.

Kebutuhan adanya data dan

peta akan keberadaan petani kelapa sawit mandiri menjadi persoalan bagi banyak pihak termasuk SPKS. Sebab itu, kehadiran SPKS juga mendorong para anggotanya untuk melakukan pembangunan data base kebun sawit yang dikelolanya. Sejak Tahun 2015, SPKS membantu para anggotanya guna memiliki data kebun sawit miliknya melalui sistem pendataan yang rinci berdasarkan nama, alamat, peta polygon dan data produksinya.

Keberadaan rincian data anggota SPKS ini, kemudian dilakukan pemantauan akan keberadaannya, sehingga SPKS dapat membantu para anggotanya berdasarkan datanya. Dari data anggota SPKS, keberadaan petani kelapa sawit mandiri dapat diketahui akan legalitas pengelolannya. Ada yang sudah memiliki legalitas Sertifikat Hak Milik (SHM), Ada yang mengelola kebun sawit didalam kawasan hutan termasuk lahan gambut, ada yang sudah menghasilkan produktivitas panen yang baik maupun berbagai kendala yang sedang dihadapi petani kelapa sawit mandiri saat sekarang.

Sebab itu, kebutuhan akan pengetahuan dan informasi terkini yang dibutuhkan petani kelapa sawit mandiri, menjadi bagian dari kerja

SPKS untuk membantu anggotanya. Kegiatan pelatihan praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan, pelatihan akan perawatan dan kebutuhan pupuk serta kebutuhan akan waktunya replanting kebun sawit petani mandiri.

SPKS juga melakukan komunikasi kepada para pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah pusat dan daerah, perusahaan perkebunan kelapa sawit nasional, perguruan tinggi nasional, para ahli budidaya, Lembaga Swadaya Masyarakat sosial dan lingkungan, hingga media massa nasional. Melalui kolaborasi para pemangku kepentingan ini, SPKS mendorong adanya kebutuhan akan legalitas lahan kebun milik petani kelapa sawit mandiri mendapatkan dukungan dari semua pihak sehingga memiliki sertifikat keberlanjutan.

Sebagai informasi, SPKS melakukan pengembangan data mengikuti standar data kebutuhan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) yang juga mendukung kebutuhan dasbor nasional akan komoditas berkelanjutan yang dibangun pemerintah pusat dan daerah. Hingga Tahun 2024, SPKS berhasil melakukan pendataan di 22 Kabupaten atau kota, dengan total lahan perkebunan kelapa sawit seluas 41.920,29 hektar yang



Dok. SPKS untuk InfoSAWIT/Ketua Umum SPKS Sabarudin bersama Ketua Gapki Eddy Martono

berasal dari lahan perkebunan kelapa sawit yang terpetakan sebanyak 20.478 persil yang berhasil terdata dan terpetakan secara polygon.

3. Membangun Kelembagaan Petani Mandiri

Kelembagaan petani mandiri, memegang peranan kunci guna mempercepat keberadaan sawit berkelanjutan. Melalui perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di tingkatan petani kelapa sawit sehingga membutuhkan adanya kelembagaan yang kuat. Sebab itu, SPKS berfokus melakukan pembangunan kelembagaan petani kelapa sawit mandiri, melalui pembentukan koperasi petani.

Melalui pembentukan kelompok-

kelompok petani sawit mandiri, keberadaannya disinergikan satu sama lain, sehingga mampu membentuk kelembagaan yang kuat dalam koperasi petani kelapa sawit mandiri. Saat ini, keberadaan koperasi petani sawit menghadapi banyak tantangan akibat berbagai kejadian yang menimbulkan trauma petani di masa lalu. Berbagai isu negatif terkemuka akan koperasi petani di masa lalu, seperti isu kepengurusan, transparansi, pengelolaan keuangan dan sebagainya.

Kendati masih dihantui persoalan masa lalu, namun SPKS terus memberikan pemahaman kepada petani kelapa sawit mandiri akan pentingnya kelembagaan petani. Lantaran, hampir semua dukungan



Dok. SPKS untuk InfoSAWIT

dari Pemerintah Pusat dan Daerah, serta swasta diberikan melalui kelembagaan yang dimiliki petani. Sebab itu, SPKS mendorong para petani kelapa sawit mandiri dapat memiliki kelembagaan seperti Koperasi Petani Kelapa Sawit Mandiri.

Proses pembangunan kelembagaan Koperasi Petani Kelapa Sawit Mandiri yang dilakukan SPKS dimulai dari bawah melalui forum Rembug Tani, yang harus dihadiri oleh semua calon anggota kelembagaan. Rembug Tani ini penting dilakukan, guna memastikan aspirasi dan masukan dari petani kelapa sawit mandiri dapat tersalurkan melalui kelembagaan. Sebab itu, keberadaan kelembagaan petani yang dibentuk, dapat kebersamaan aspirasi yang diperjuangkan sekaligus mendorong keberhasilan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara bersama-sama.

Sebagai informasi, SPKS hingga dewasa ini, beranggotakan 70 Koperasi Petani Kelapa Sawit Mandiri yang aktif dengan tantangan dan pertumbuhan yang berbeda-beda. Ada yang sudah berhasil membangun tata kelola organisasinya dengan baik dan ada yang masih dalam tahap perkembangan. Dari keberadaan koperasi ini, kemudian akan diseleksi guna di masukan kedalam target sertifikasi keberlanjutan ISPO dan RSPO.

Kelembagaan dalam bentuk Koperasi Petani Kelapa Sawit Mandiri, memiliki peranan penting guna melakukan perjanjian kemitraan dengan perusahaan perkebunan yang mengolah hasil panen petani kelapa sawit mandiri sesuai dengan aturan Permentan No.1 Tahun 2018, Tentang Penjualan Hasil Panen

Tandan Buah Segar (TBS) yang dibeli oleh Perusahaan wajib melalui Koperasi, yang saat ini telah diganti ke Permentan No. 13 Tahun 2024.

SPKS kedepan berharap akan kelembagaan para anggota SPKS terus berkembang dan berdaya tahan lebih kuat guna menyejahterakan anggotanya.

4. Pelatihan Praktik Budidaya Terbaik dan Berkelanjutan.

Sebagai organisasi petani, SPKS mendorong koperasi anggotanya guna memberikan pelatihan-pelatihan praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan yang dibutuhkan anggotanya. SPKS sangat konsen terhadap pelatihan bagi anggota petaninya, supaya dapat menerapkan praktik budidaya kelapa sawit dengan baik dan benar. Sehingga para petani anggota SPKS dapat memiliki kemampuan praktik terbaik dan berkelanjutan berlandaskan Good Agriculture Practices (Praktik Agrikultur yang Baik).

Secara umum, sebagian besar petani kelapa sawit mandiri memiliki produktivitas panen sebesar 12 ton TBS/hektar/tahun dengan rendemen CPO berkisar 3 ton CPO/hektar/tahun. Keberadaan produktivitas ini terbilang masih sangat rendah, lantaran banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan panennya, seperti penggunaan benih sawit, kemampuan perawatan (pupuk, pestisida dan herbisida), sarana dan prasarana kebun sawit, dan cara pemanenannya.

Berbagai persoalan yang dihadapi petani kelapa sawit mandiri terkini, menjadi dorongan kuat bagi SPKS guna melakukan berbagai pelatihan praktik budidaya terbaik bagi para anggotanya. Secara berkelanjutan, SPKS memiliki target pelatihan praktik



Dok. SPKS untuk InfoSAWIT

budidaya terbaik kepada petani kelapa sawit mandiri sebanyak 2.000 orang tiap tahun, supaya petani kelapa sawit mandiri memiliki kemampuan praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan yang baik dan benar.

Ruang lingkup pelatihan bagi petani kelapa sawit mandiri anggota SPKS seperti pelatihan akan kesuburan tanah, topografi lahan, pemupukan terbaik, pengelolaan gulma, pengendalian hama dan penyakit, cara pemanenan TBS, pemahaman akan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan pengelolaan lingkungan serta sosial sekitar perkebunan kelapa sawit.

Pelatihan ini juga disesuaikan dengan kebutuhan akan proses sertifikasi berkelanjutan yang dibutuhkan ISPO dan RSPO guna mendorong proses sertifikasi yang dilakukan koperasi petani anggota SPKS menjadi lebih terukur dan dapat dilakukan. Tujuannya, supaya pelatihan yang dilakukan bersama, dapat memberikan pemahaman kepada petani kelapa sawit mandiri guna mengelola kebun sawitnya dengan baik dan benar sehingga menghasilkan produktivitas yang tinggi.

5. Sertifikasi Kebun Sawit Petani Mandiri.

Berlandaskan kemauan baik yang kuat dari petani kelapa sawit mandiri, proses pendataan kebun sawit miliknya, berbagai pelatihan praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan, dan keberadaan koperasi petani mandiri yang sudah terbentuk, menjadi penguat bagi petani kelapa sawit dalam melakukan sertifikasi keberlanjutan pada lahan kebun sawitnya.

Kelembagaan Koperasi Petani Kelapa Sawit Mandiri yang sudah berjalan dan kuat, dapat terus melakukan berbagai pelatihan bagi para anggotanya. Tantangan terbesar dari sertifikasi keberlanjutan adalah kebutuhan biaya yang cukup mahal bagi petani. Lantaran, kebutuhan biaya sertifikasi berkisar Rp 2 hingga Rp 3 juta per petani.

Kendala terbesar yang dihadapi SPKS saat ini, banyak koperasi petani anggota SPKS yang sudah siap mendapatkan sertifikasi ISPO dan RSPO terkendala akibat tidak memiliki kemampuan pembiayaannya. Lantaran, kebutuhan sertifikasi terbesar berasal dari kondisi pra sertifikasi, biaya lembaga sertifikasi



Dok. SPKS untuk InfoSAWIT/Konsultasi Publik Identifikasi dan Rencana Pengelolaan Areal High Conservation Value (HCV)

6. Menghubungkan Pasar dan Konsumen Kepada Petani Sawit Mandiri.

Peranan besar para pedagang dan industri turunan minyak sawit berkelanjutan, bagi keberadaan minyak sawit berkelanjutan menjadi bagian dari pertumbuhan konsumsi minyak sawit berkelanjutan yang kian membesar. Lantaran, perdagangan minyak sawit dan produk turunannya, sebagai bagian dari bisnis minyak nabati dunia yang senantiasa meningkat kebutuhannya sejalan dengan pertumbuhan jumlah populasi manusia di dunia.

Kebutuhan konsumsi dari pasar dan konsumen global termasuk Indonesia ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebutuhan akan minyak sawit berkelanjutan. Sebab itu, keterlibatan pedagang, industri turunan hingga konsumen akhir dari produk turunan sawit, menjadi penting bagi tersedianya minyak sawit berkelanjutan yang dihasilkan petani kelapa sawit mandiri.

Keterlibatan pasar dan konsumen akhir ini, dapat turut serta membantu para petani kelapa sawit mandiri, guna menyiapkan berbagai persyaratan yang dibutuhkan akan sertifikasi

dan proses audit serta perbaikannya.

Akibatnya, banyak koperasi anggota SPKS yang masih menunggu hingga saat ini, guna mendapatkan dukungan pendanaan sertifikasi berkelanjutan. Sebab itu, SPKS berharap kepada para pemangku kepentingan supaya dapat bekerjasama melakukan kerja nyata bagi petani kelapa sawit mandiri dalam menyertifikasi kebun sawitnya.

SPKS juga berharap akan sertifikasi ISPO bagi petani kelapa sawit mandiri menjadi lebih mudah dilakukan melalui pendanaan BDPDKS, lantaran sebagai bagian dari pemerintah, BDPDKS juga memiliki tugas mendorong percepatan sertifikasi ISPO bagi perkebunan kelapa sawit milik petani mandiri. Harapannya, pendanaan BDPDKS bagi sertifikasi perkebunan kelapa sawit mandiri dapat lebih mudah diakses para petani kelapa sawit mandiri.

Termasuk dukungan nyata bagi petani dari pasar atau konsumen, yang menginginkan adanya minyak sawit dan produk turunan berkelanjutan. Pasalnya, pemenuhan akan minyak sawit berkelanjutan juga berasal dari keberadaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang dikelola petani

kelapa sawit mandiri. Sebab itu, SPKS mendorong keterlibatan pasar atau konsumen melalui perusahaan-perusahaan yang menggunakan minyak sawit berkelanjutan sepanjang mata rantai produksi produk turunannya hingga konsumen penggunaannya. Keterlibatan mata rantai perdagangan minyak sawit berkelanjutan dari hulu hingga hilir menjadi penting, lantaran prinsip dan kriteria berkelanjutan yang universal telah menjadi norma bersama semua pemangku kepentingan bagi tersedianya minyak sawit berkelanjutan di dunia.



Dok. SPKS untuk InfoSAWIT/SPKS Menghubungkan Pasar dan Konsumen Kepada Petani Sawit Mandiri.



Dok. SPKS untuk InfoSAWIT/Restorasi ekosistem berbasis masyarakat.

keberlanjutan. Sebab itu, SPKS berharap akan terjalinnnya kerja sama dengan pasar dan konsumen sebagai pembeli utama dari produksi minyak sawit berkelanjutan yang mampu dihasilkan petani kelapa sawit mandiri.

Berbagai upaya yang dilakukan SPKS hingga dewasa ini, diharapkan mendapat dukungan dari pasar dan konsumen sebagai upaya bersama dalam menyediakan minyak sawit berkelanjutan secara bertanggung jawab. Kemudahan akses pasar dan insentif langsung bagi petani sawit mandiri, diharapkan SPKS dapat menjadi keuntungan yang dapat dirasakan petani sawit mandiri.

7. Restorasi Ekosistem Berbasis Masyarakat.

Restorasi ekosistem merupakan langkah efektif dalam melakukan mitigasi dan adaptasi krisis iklim. Upaya ini sejalan dengan peningkatan ketahanan pangan, melindungi keanekaragaman hayati, dan menjaga neraca air. Merujuk hasil dari Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendeklarasikan *the UN decade on ecosystem restoration* bertujuan menyinergikan upaya restorasi ekosistem secara

masif pada ekosistem yang rusak dan terganggu pada periode 2021-2030. Melalui spirit perbaikan ekosistem dan lahan, maka SPKS mendorong berbagai upaya guna melakukan restorasi yang berbasis masyarakat, yang pelaksanaanya berlokasi di Desa Seureuke, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh utara.

Restorasi ekosistem tidak hanya mengembalikan fungsi ekologis, tetapi juga mengembalikan fungsi hutan sebagai sumber mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan tata kelola yang tepat, restorasi ekosistem dapat mendukung pemulihan fungsi hutan dan lahan sebagai penyedia manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi bagi manusia.

Lokasi lahan restorasi berada di sekitar area perkebunan kelapa sawit yang dikelola petani mandiri, sebagai sasaran program utamanya. Kondisi perbaikan lahan restorasi, akan memberi manfaat pada ketersediaan air perkebunan sawit rakyat dari hutan dan lahan yang ditingkatkan kembali fungsi hidrologinya. Manfaat lain yang secara tidak langsung dapat diperoleh oleh masyarakat ke depannya, kemudahan dalam memperoleh sertifikasi ISPO dan RSPO melalui keberadaan Nilai



Konservasi Tinggi (HCV/HCSA). Keberadaan lahan restorasi ini, dapat membantu masyarakat guna memahami wawasan dasar dan terlibat dalam penerapan prinsip-prinsip yang baik mengelola ekosistem hutan.

Lahan restorasi ditanami berbagai jenis tanaman yang memiliki fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial-budaya. Ada 14 tanaman yang tertanam pada area restorasi seluas 2 Ha tersebut, yaitu Mahoni, Matoa, Durian, Petai, Pinang, Duku, Klengkeng, Sengon, Kandri, marak, Jati gamalina, Jambu batu, jengkol, dan Marak. Tahap-tahap kegiatan restorasi melalui sosialisasi program, PADIATAPA, pemeliharaan lahan dan jenis bibit, pembibitan, pembersihan lahan, penanaman, dan perawatan tanaman. Semua proses ini dilakukan secara inklusif dan melibatkan berbagai stakeholder, sehingga menjadi pembelajaran bersama yang bisa diperluas pada lokasi-lokasi lain kedepannya. ⁵

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT DENGAN ASOSIASI
DESA SAWIT INDONESIA



Dok. SPKS untuk InfoSAWITIMOU antara SPKS dan Asosiasi Desa Sawit Indonesia (ADESI) dan Kemendes.

MENDORONG EKONOMI DESA MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PETANI DAN SERTIFIKASI KEBERLANJUTAN

>> Tim InfoSAWIT

MOTIVASI KEBERHASILAN EKONOMI MENJADI PEMICU BAGI PETANI MANDIRI KELAPA SAWIT, GUNA MENDAPATKAN SERTIFIKASI KEBERLANJUTAN. KENDATI SECARA OTOMATIS, KEBERHASILAN SERTIFIKASI KEBERLANJUTAN JUGA MENDORONG KESELARASAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERHADAP KONDISI SOSIAL DAN LINGKUNGAN SEKITARNYA, TERUTAMA EKONOMI DESA YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA.

Sejak diperkenalkan kepada masyarakat luas, sertifikasi keberlanjutan minyak sawit, senantiasa mendorong adanya perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit. Lantaran melalui prinsip dan kriteria berkelanjutan, keberadaan perkebunan kelapa sawit diharapkan dapat selaras dengan kebutuhan *People, Planet* dan *Profit*.

Dikenal sebagai keselarasan 3P, konsep ini dijadikan rujukan para pemangku kepentingan industri minyak sawit dunia sebagai panduan akan keberhasilan praktik keberlanjutan yang dilakukan pada mata rantai minyak sawit dan produk turunannya.

Secara umum, bisnis berkelanjutan

memang menerapkan Triple Bottom Line. Konsep triple bottom line ini merupakan konsep bisnis berkelanjutan yang mengukur nilai kesuksesan dari bisnis yang dilakukan dengan menggunakan tiga kriteria yaitu *People* (sosial), *Planet* (Lingkungan) dan *Profit* (Ekonomi) yang dikenal sebagai 3P.

Sebab itu, melalui penerapan ukuran 3P, keberhasilan petani mandiri mendapatkan sertifikasi berkelanjutan, akan mendorong kesejahteraan hidup petani kelapa sawit dan kondisinya selaras dengan lingkungan sekitarnya.

Tidak semata menghasilkan keuntungan ekonomi semata, melalui penerapan 3P, maka keberlangsungan

perkebunan kelapa sawit milik petani akan terjamin keberlangsungan usaha berkebutuhannya. Lantaran kepedulian terhadap sosial dan lingkungan sekitarnya secara otomatis akan berpengaruh positif di masa depan. Terlebih, keberadaan perkebunan kelapa sawit milik petani mandiri akan memiliki citra positif di masyarakat luas termasuk konsumen minyak sawit dunia.

Selain itu, dampak usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan akan menciptakan keselarasan dengan sosial dan lingkungan sekitarnya, sehingga menghasilkan keuntungan yang senantiasa berkelanjutan di masa depan.

Adalah Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) sebagai organisasi petani mandiri di Indonesia, yang mendorong berbagai perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit petani mandiri dengan melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan multi pihak yang berkepentingan akan minyak sawit Indonesia. Menurut Ketua Umum SPKS, Sabarudin, keberadaan petani kelapa sawit mandiri menjadi bagian perkebunan kelapa sawit nasional seluas 16,38 juta hektar, dimana sebesar 42% lebih dimiliki petani kelapa sawit.

Keberadaan petani kelapa sawit mandiri yang tersebar di sentra-sentra perkebunan kelapa sawit nasional, memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan produksi minyak sawit nasional. Sebab itu, menurut Sabarudin, keberadaan petani mandiri butuh dukungan dan kerjasama dari banyak pihak.

“Keberadaan petani mandiri kelapa sawit membutuhkan kerjasama dan kolaborasi dari multi pihak yang berkepentingan terhadap minyak sawit berkelanjutan”, ujar Sabarudin menjelaskan.

Sebagai organisasi petani mandiri kelapa sawit, SPKS senantiasa mendorong para anggotanya guna melakukan praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan berlandaskan prinsip dan kriteria berkelanjutan yang berlaku universal. Sebab itu, sertifikasi berkelanjutan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang berlaku mandatori oleh Pemerintah Indonesia, wajib dilakukan para anggotanya.

Kendati tidaklah mudah, namun SPKS selalu memberikan informasi dan pengetahuan kepada para anggotanya mengenai minyak sawit berkelanjutan. Melalui keberlanjutan informasi dan pengetahuan ini, diharapkan dapat mendorong kesadaran para petani mandiri kelapa



sawit akan pentingnya minyak sawit keberlanjutan.

“Upaya bersama anggota SPKS ini dibutuhkan, agar kesejahteraan petani mandiri menjadi lebih baik”, jelas Sabarudin.

Komitmen kuat akan penerapan prinsip dan kriteria berkelanjutan di perkebunan kelapa sawit milik petani mandiri ini, diyakini SPKS, akan berdampak langsung terhadap produktivitas hasil panennya. Lantaran, sebagian besar kebun sawit petani mandiri hanya dikelola secara biasa atau turun temurun sehingga hasil panennya tidak maksimal.

Melalui penerapan praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan, SPKS berharap akan keberhasilan kebun sawit petani mandiri menjadi lebih maju dengan mendapatkan hasil panen yang maksimal. “Produktivitas hasil panen dari kebun sawit petani mandiri akan lebih tinggi sehingga keuntungan petani mandiri menjadi

lebih besar”, tandasnya.

Petani Mandiri Sejahtera, Mendorong Ekonomi Desa Lebih Maju

Keberadaan petani mandiri kelapa sawit yang berada di desa-desa pelosok, tentu saja secara langsung akan mendorong ekonomi desa menjadi lebih maju. Pasalnya, keberadaan petani mandiri akan mendapatkan hasil panen yang lebih banyak sehingga keuntungan dari menjual hasil panennya akan menjadi lebih besar.

Secara ekonomi, keuntungan membesar yang didapat petani akan mendorong kesejahteraan hidup petani mandiri, sehingga roda ekonomi desa akan berputar lebih kencang dan menghasilkan multi efek bagi masyarakat luas. Sebab itu, menurut Sabarudin, keberadaan petani mandiri akan menjadi kunci utama guna mendorong pertumbuhan ekonomi



Dok. SPKS untuk InfoSAWIT/SPKS sosialisasikan ISPO kepada petani swadaya Riau



Dok. SPKS untuk InfoSAWIT/Petani Sawit Swadaya Anggota SPKS di Riau mendapatkan sertifikat RSPO

desa.

Jelasnya, apabila tidak melakukan praktik budidaya terbaik, maka petani mandiri hanya mampu menghasilkan panen Tandan Buah Segar (TBS) sekitar 3-5 ton TBS/hektar/tahun. Sebaliknya, jika mau dan mampu melakukannya, maka hasil panen kebun sawitnya berkisar 6-12 ton TBS/hektar/tahun.

Hasil panen TBS yang lebih banyak didapatkan petani mandiri kelapa sawit, tentu saja tidak secara instan dan mudah didapatkan petani. Sebab, berbagai aktivitas dan kerja keras harus dilakukan petani mandiri dengan rajin dan tekun. Namun, keberhasilan petani mandiri melakukannya, bukan sekedar isapan jempol semata, sebagian anggota SPKS telah berhasil melakukannya.

“Jika bergabung bersama SPKS, maka petani mandiri kelapa sawit dapat saling belajar dan mencontoh dari keberhasilan anggota lainnya yang telah mendapatkan sertifikasi ISPO dan RSPO”, kata Sabarudin.

Dengan keberhasilan petani mandiri kelapa sawit meningkatkan kesejahteraan hidupnya, Sabarudin berharap dapat mendorong secara langsung pertumbuhan ekonomi di desanya. Sebab, melalui keberhasilan para petani mandiri di suatu desa, maka secara bersama-sama dapat

mendorong pertumbuhan ekonomi didesanya.

Kondisi kesejahteraan desa-desa yang masyarakatnya berprofesi sebagai petani mandiri kelapa sawit, seringkali menghadapi kebuntuan ekonomi akibat minimnya penghasilan yang didapat dari berkebun kelapa sawit. Sebab itu, apabila secara masif didorong perbaikan tata kelola melalui praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan, maka kesejahteraan hidup sebagian masyarakat akan menjadi lebih sejahtera.

“Melalui penerapan prinsip dan kriteria keberlanjutan, maka kebutuhan manusia, lingkungan dan ekonomi dapat selaras dan menghasilkan kesejahteraan bersama di masa mendatang”, jelas Sabarudin.

Melalui keberadaan SPKS sebagai

organisasi petani mandiri kelapa sawit, diharapkan dapat mendorong kesadaran para petani mandiri kelapa sawit akan pentingnya keberlanjutan, yang tersebar di berbagai daerah sentra perkebunan kelapa sawit. Kesadaran akan keberlanjutan dapat ditingkatkan menjadi kemauan dan komitmen yang kuat dalam menerapkan prinsip dan kriteria berkelanjutan, sehingga di masa mendatang pengelolaan perkebunan kelapa sawit milik petani mandiri dapat menjadi lebih baik dengan hasil produktivitas panen yang lebih tinggi.

“Jika menerapkan prinsip dan kriteria berkelanjutan, maka petani mandiri kelapa sawit akan mendapatkan kesejahteraan hidup lebih baik di masa depan”, kata Sabarudin menegaskan. ☒



SABARUDIN

LAHIR : SULAWESI TENGGARA

JABATAN : KETUA UMUM SPKS

PENDIDIKAN

SARJANA EKONOMI :

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS HALUOLEO

MAGISTER MANAJEMEN:

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TRISAKTI



Foto: Sawitfest 2021/Muhammad Ridho Harbiansyah

ANGIN SEGAR PENUNDAAN EUDR

>> Atep Yulianto Irawan

PENUNDAAN KEBIJAKAN THE EUROPEAN UNION ON DEFORESTATION-FREE REGULATION (EUDR), TELAH MEMBERIKAN RUANG BAGI PELAKU SAWIT UNTUK MELAKUKAN NEGOSIASI Mencari titik temu. Petani sawit diyakini masih menjadi ganjalan.

Munculnya usulan penundaan kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) ibarat menjadi angin segar bagi pelaku sawit di negara produsen termasuk Indonesia. Penundaan ini diyakini menjadi waktu tambahan guna mematangkan aksi selanjutnya.

Sekretaris Jenderal Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), Rizal Affandi Lukman menyambut baik usulan penundaan ini. Menurutnya, penundaan ini penting untuk memberi waktu tambahan bagi negara-negara produsen minyak sawit dan Uni Eropa (UE) untuk mematangkan persiapan mereka dalam memenuhi persyaratan regulasi tersebut. EUDR yang bertujuan mengurangi deforestasi akibat komoditas tertentu, termasuk sawit, telah menjadi isu utama dalam

hubungan perdagangan antara negara produsen dan UE.

Sejak Mei 2023, tercatat CPOPC aktif memfasilitasi Joint Mission terkait EUDR, dengan pertemuan puncaknya pada 12 September 2024 dalam forum Ad Hoc Joint Task Force EUDR. Selama periode tersebut, CPOPC secara konsisten memperjuangkan penundaan ini, bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, Malaysia, serta Uni Eropa. Mereka juga melibatkan dialog dengan industri, lembaga non-pemerintah, dan konsumen di UE.

Rizal menekankan bahwa penundaan EUDR akan memberi lebih banyak waktu untuk mempersiapkan negara-negara produsen, terutama dalam pengelolaan minyak sawit. Sawit adalah minyak nabati yang paling ketat dalam hal standar keberlanjutan. "Di Indonesia,

keberlanjutan diatur melalui sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), sedangkan di Malaysia melalui Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO)," katanya kepada **InfoSAWIT**, belum lama ini.

Dengan adanya sertifikasi ini, negara produsen sudah memiliki dokumen yang dapat menjadi bagian dari syarat EUDR, seperti Due Diligence Statement (DDS). Penundaan akan memungkinkan petani kecil untuk masuk dalam sistem nasional seperti Dasbor Nasional, yang memastikan mereka tetap menjadi bagian dari rantai pasokan.

Dasbor Nasional: Alat Penelusuran

Salah satu upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah pembangunan Dasbor Nasional, yang merupakan bagian dari

Workstream 3 dalam lima Kelompok Kerja (*Workstreams*) EUDR. Dasbor Nasional akan berfungsi sebagai *platform* yang mampu menyediakan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan EUDR, terutama dalam hal ketelusuran.

Dalam konteks EUDR, terdapat persyaratan yang cukup sensitif dari sisi hukum negara produsen, seperti penyediaan data geolokasi untuk memastikan bahwa produk sawit yang masuk ke pasar UE tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi. Dasbor Nasional diharapkan mampu mengatasi isu ini dan mengurangi risiko yang tidak diinginkan, seperti gangguan pasokan.

Namun, Rizal menggarisbawahi bahwa yang perlu segera dilakukan adalah memastikan pengembangan dan operasionalisasi alat ketelusuran di negara anggota CPOPC, baik di tingkat domestik maupun dalam kolaborasi dengan operator di Uni Eropa. Komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak teknis di UE, seperti *Competent Authority* dan operator negara anggota UE, perlu terus ditingkatkan. Kerja sama teknis antar *Workstreams* juga penting, terutama untuk menyelesaikan isu yang belum tuntas, seperti definisi hutan dan bentuk dokumen geolokasi.

Rupanya ada dua isu utama yang menjadi perhatian CPOPC terkait kebijakan EUDR. Pertama, belum adanya transparansi dalam penetapan sistem benchmarking. Kedua, potensi diskriminasi antar negara produsen maupun antar komoditas yang terkena dampak regulasi ini.

Dalam hal *benchmarking system*, Rizal menekankan bahwa CPOPC berharap tidak ada negara anggota yang dikenakan label “resiko tinggi.” Konsekuensinya sangat berat, mulai dari pembatasan akses pasar hingga



Dok. Istimedia

“... yang perlu segera dilakukan adalah memastikan pengembangan dan operasionalisasi alat ketelusuran di negara anggota CPOPC”

Rizal Affandi Lukman

Sekretaris Jenderal CPOPC

terganggunya hubungan internasional. Ia menekankan bahwa UE bisa saja mengeluarkan kebijakan secara unilateral, tetapi jika kebijakan tersebut berdampak pada negara lain, mereka seharusnya lebih mengutamakan dialog dan membangun kesepahaman bersama. CPOPC telah berupaya memfasilitasi dialog tersebut melalui Joint Mission dan Ad Hoc Joint Task Force (JTF) untuk EUDR.

CPOPC juga mendorong UE agar transparan dalam penyusunan kriteria benchmarking dan membuka ruang dialog dengan negara produsen supaya kriteria yang diterapkan bersifat obyektif dan adil. Kekhawatiran CPOPC lainnya adalah agar tidak ada komoditas atau negara produsen yang diperlakukan secara berbeda. Rizal menegaskan bahwa CPOPC ingin memastikan minyak sawit tidak diperlakukan lebih ketat dibandingkan komoditas lain, seperti kopi, coklat, kayu, dan karet. Selain itu, ia juga menyoroti potensi perbedaan perlakuan antar negara produsen, di mana Indonesia dan

Malaysia ditekan untuk patuh pada EUDR sementara negara lain mungkin mendapatkan kelonggaran.

Persiapan CPOPC Hadapi EUDR

Dalam menghadapi EUDR, CPOPC telah melakukan berbagai persiapan untuk memastikan agar petani kecil tidak tersingkir dari rantai pasok ke UE. Salah satunya adalah melalui penguatan sertifikasi keberlanjutan nasional dan pengembangan platform alat ketelusuran, seperti Dasbor Nasional untuk Indonesia dan Sawit Intelligent Management System (SIMS), GeoPalm Portal, serta MSPO Trace untuk Malaysia.

Selain itu, CPOPC terus melakukan diskusi untuk membangun kesepahaman bersama terkait peta acuan dan definisi hutan yang akan digunakan sebagai dasar dalam proses pemenuhan EUDR. Isu penting lainnya adalah perlindungan data. CPOPC meminta jaminan dari Uni Eropa agar data-data yang diperlukan tidak bocor atau disalahgunakan.

Dalam riset yang dilakukan CPOPC terhadap lima komoditas yang menjadi sasaran EUDR—minyak sawit, kopi, coklat, kayu, dan karet—nilai ekspor tahun lalu mencapai 4,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp68,2 triliun. Dari angka tersebut, 75 persen berasal dari minyak sawit, menunjukkan betapa pentingnya peran komoditas ini bagi perekonomian negara produsen.

Dengan upaya yang terus dilakukan oleh CPOPC dan para anggotanya, diharapkan implementasi EUDR bisa berjalan lebih baik dan adil, tanpa mengorbankan kepentingan negara produsen, terutama petani kecil yang bergantung pada industri kelapa sawit.

Sementara bagi **Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono**, penundaan kebijakan EUDR bukan hanya karena memberi waktu ekstra,

tetapi juga membuka peluang negosiasi lebih lanjut antara pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa.

“Paling tidak jeda waktu ini bisa dimanfaatkan kembali untuk negosiasi. Kita memang berusaha mematuhi EUDR, namun Uni Eropa juga perlu memahami bahwa Indonesia punya Undang-Undang yang harus dipatuhi,” ujar Eddy kepada **InfoSAWIT**. Harapan utamanya adalah agar kedua belah pihak dapat mencapai titik temu, demi menjaga keseimbangan antara kepentingan perdagangan internasional dan kedaulatan hukum nasional.

Ia mengungkapkan, penundaan ini bukan sekadar jeda bagi industri sawit Indonesia, tetapi juga ruang yang sangat penting untuk memperbaiki tata kelola, khususnya dalam pendataan kebun masyarakat. Eddy menjelaskan bahwa pemerintah tengah berupaya keras melalui program Nasional Dasbor, yang bertujuan memastikan kepemilikan kebun masyarakat tercatat dengan baik. “Petani wajib memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), sehingga data kepemilikan mereka jelas dan tidak ada masalah di kemudian hari,” tambahnya.

Di balik optimisme ini, ada tantangan besar yang harus segera dihadapi, terutama bagi para petani. Salah satu hal yang paling mendesak adalah menyosialisasikan bahwa pembukaan lahan setelah tanggal 31 Desember 2020 tidak akan diterima oleh Uni Eropa. Ini karena lahan yang dibuka setelah tanggal tersebut akan masuk dalam kriteria deforestasi. Bagi petani kecil, informasi ini mungkin belum sepenuhnya dipahami, dan sosialisasi yang efektif sangat diperlukan agar mereka dapat menyesuaikan praktik budidaya sawit mereka dengan regulasi internasional.

Perusahaan Lebih Siap

Bagi perusahaan besar, situasi ini sedikit lebih baik. Sejak



Dok. InfoSAWIT

“Petani wajib memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), sehingga data kepemilikan mereka jelas dan tidak ada masalah di kemudian hari”

Eddy Martono

Ketua Umum GAPKI

2011, pemerintah Indonesia telah memberlakukan moratorium pembukaan lahan baru untuk perusahaan sawit. Bahkan, dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2019, larangan tersebut semakin diperkuat. “Jadi, perusahaan sebenarnya tidak terlalu bermasalah dengan EUDR karena sudah lama tidak bisa membuka lahan,” kata Eddy.

Namun tidak demikian dengan lahan milik masyarakat (petani). Salah satu yang perlu diantisipasi adalah kewajiban pelaksanaan 20% FPKM (Fasilitas Pengembangan Kawasan Masyarakat) setelah batas waktu 31 Desember 2020. FPKM merupakan upaya perusahaan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, khususnya dalam hal lingkungan dan sosial. “Oleh karena itu, perusahaan perlu mempersiapkan pemisahan produk, mana yang akan diekspor ke Uni Eropa, dan mana yang untuk pasar dalam negeri atau ekspor ke luar Uni Eropa,” jelas Eddy.

Kabar baik dari Eropa tidak berhenti sampai di situ. Komisi Eropa juga telah mengumumkan panduan tambahan untuk mendukung implementasi EUDR,

sekaligus mengusulkan perpanjangan waktu pelaksanaan bagi perusahaan besar hingga 30 Desember 2025. Sementara itu, bagi perusahaan mikro dan kecil, tenggat waktu diberikan hingga 30 Juni 2026.

Usulan ini bukan tanpa alasan. Banyak pemangku kepentingan global yang menyuarakan kekhawatiran mereka tentang kesiapan menghadapi aturan baru tersebut. Komisi Eropa mencatat bahwa meskipun secara teknis perangkat implementasi sudah siap, sejumlah negara anggota UE dan mitra global belum sepenuhnya siap. “Perpanjangan 12 bulan ini akan memberikan waktu untuk memastikan implementasi yang efektif dan tepat,” tulis Komisi Eropa dalam keterangan resminya yang diperoleh **InfoSAWIT** pada awal Oktober 2024.

Panduan tambahan yang disediakan oleh Komisi Eropa diharapkan bisa memberikan kejelasan, baik bagi perusahaan-perusahaan besar maupun otoritas penegak hukum di Eropa dalam menerapkan peraturan ini. Eddy menilai, panduan ini penting agar tidak ada lagi kebingungan di lapangan. “Meski ada perpanjangan, kita tetap harus mempersiapkan diri dengan baik. Jangan sampai waktu ini terbuang sia-sia,” katanya.

Tampak jelas bahwa penundaan ini bukan hanya kesempatan untuk Indonesia, tetapi juga bagi Uni Eropa. Kedua belah pihak kini memiliki waktu lebih untuk berdialog dan mencari solusi terbaik yang dapat menguntungkan semua pihak.

Eddy yakin bahwa dengan upaya bersama, tata kelola industri sawit Indonesia akan semakin kuat, terutama dengan program-program seperti Nasional Dasbor dan kewajiban STDB bagi petani. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa semua pihak, dari petani kecil hingga perusahaan besar, siap menghadapi tantangan ini.

Dengan perpanjangan waktu yang diberikan, Eddy berharap Indonesia tidak hanya mematuhi aturan EUDR, tetapi juga tetap mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasional dalam perdagangan internasional. “Ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk memperbaiki tata kelola sawit dan memastikan bahwa sawit Indonesia tetap kompetitif di pasar global,” tutup Eddy.

Musim Mas Siap Hadapi EUDR

Dalam upaya memenuhi ketentuan EUDR, salah satu perusahaan minyak sawit yang terintegrasi, Musim Mas Group telah mengambil langkah maju. **General Manager Project & Program Musim Mas Group, Rob Nicholls**, dengan tegas menyatakan bahwa perusahaan siap menghadapi aturan tersebut. “Kami sudah *comply* dengan EUDR, dan meskipun kebijakan ini sempat ditunda selama setahun, sekarang kami sudah siap,” ungkapnya kepada **InfoSAWIT** di Jakarta.

Musim Mas tidak hanya berfokus pada persiapan di tingkat kebijakan, tetapi juga pada aspek logistik yang menghubungkan seluruh rantai pasok mulai dari pabrik kelapa sawit, penyulingan (refinery), hingga ke kapal pengiriman. “Kami bahkan telah melakukan uji coba agar dapat memenuhi semua yang ditetapkan dalam EUDR,” tambah Rob. Langkah-langkah yang diambil ini mencerminkan kesiapan Musim Mas dalam mempertahankan pasar ekspor ke Uni Eropa, sekaligus menunjukkan komitmen mereka terhadap kelestarian lingkungan dan praktik keberlanjutan.

Tantangan Bagi Petani Sawit Penuhi Standar EUDR

Namun, tidak semua pihak siap dengan cepat menghadapi tantangan EUDR. **Manager of Independent Smallholder Musim Mas Group, Rudman Simanjuntak**, mengakui



“Kami sudah comply dengan EUDR, dan meskipun kebijakan ini sempat ditunda selama setahun, sekarang kami sudah siap”

Rob Nicholls

General Manager Project & Program Musim Mas Group

bahwa petani sawit independen masih kesulitan untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh kebijakan tersebut. “Untuk petani memang belum siap, terutama dalam hal ketelusuran lahan dan legalitasnya,” ungkap Rudman kepada **InfoSAWIT**.

Guna mengatasi hal ini, Musim Mas dan pemerintah kini berkolaborasi untuk membantu petani sawit agar dapat mematuhi EUDR. Salah satu langkah konkritnya adalah proyek percontohan (pilot project) di PT Siringo-ringo, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. “Proyek ini bertujuan untuk melihat apakah ada kendala terkait ketelusuran buah sawit dari petani hingga ke pabrik kelapa sawit milik Musim Mas,” jelas Rudman.

Ketelusuran (*traceability*) ini sangat penting, terutama karena terkait dengan geolokasi kebun dan memastikan bahwa buah sawit tidak berasal dari kawasan hutan. Dalam hal ini, petani dihadapkan pada tantangan memperoleh Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), yang menjadi syarat penting dalam memenuhi ketelusuran lahan. “Banyak

petani masih kesulitan mendapatkan STDB. Untungnya, program percepatan dari pemerintah sangat membantu,” tambahnya.

Proyek Ketelusuran

Di proyek PT Siringo-ringo anak usaha Musim Mas, sebanyak 80-85% pasokan buah sawit berasal dari petani. Ketelusuran yang memadai menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan rantai pasok ini, dan Musim Mas terus melaporkan kemajuan terkait ketelusuran tersebut. Rudman menyebutkan bahwa pihaknya berupaya agar seluruh petani yang terlibat dapat memenuhi kriteria EUDR dalam waktu dekat.

Musim Mas kini memiliki 18 pabrik kelapa sawit, di mana delapan di antaranya menerima pasokan buah dari petani. Tiga pabrik bahkan sepenuhnya bergantung pada pasokan buah sawit dari petani, sedangkan pabrik lainnya menerima sekitar 20-40% dari petani lokal.

Jumlah petani yang bekerja sama dengan Musim Mas mencapai lebih dari 1.097 ribu orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.954,41 hektar lahan telah dilibatkan dalam program pelatihan oleh Musim Mas. Melalui pelatihan ini, para petani dilatih untuk memenuhi standar ketelusuran yang diperlukan, sekaligus meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola lahan secara berkelanjutan.

Meskipun tantangan dalam memenuhi EUDR masih ada, langkah-langkah yang telah diambil oleh Musim Mas Group, baik dari sisi perusahaan maupun petani, menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga kelangsungan industri sawit Indonesia di pasar global. Dengan kolaborasi yang terus berlanjut antara perusahaan, petani, dan pemerintah, diharapkan standar keberlanjutan yang ditetapkan oleh EUDR dapat tercapai, tanpa mengorbankan kesejahteraan para petani sawit lokal. ☑

14 JANUARI 2025

Palm Oil Economic Review and Outlook Seminar (R&O 2025)

Tempat : Royale Chulan Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia

Website : <https://www.pocmalaysia.com/>

24 – 25 FEBRUARI 2025

Palm & Lauric Oils Price Outlook Conference & Exhibition (POC2025)

Tempat : Kuala Lumpur, Malaysia

Website : <https://www.pocmalaysia.com/>

6-8 MARET 2025

Fats & Oils International Conference - Exhibition (FOIC)

Tempat : JW Marriott Sahar, Mumbai, India

Website : <https://foic.org.in/>

18-20 MARET 2025

2025 International Biomass Conference & Expo

Tempat : Cobb Galleria Centre, Atlanta, Georgia, USA

Website : <https://ibce.bbiconferences.com/>

27-30 APRIL 2025

AOCS Annual Meeting & Expo

Tempat : Portland, Oregon, USA

Website : <https://annualmeeting.aocs.org/>

9-11 JUNI 2025

Biodiesel Summit: Sustainable Aviation Fuel & Renewable Diesel

Tempat : Chi Health Center | Omaha, Nebraska

Website : <https://few.bbiconferences.com/>

18-20 NOVEMBER 2025

MPOB International Palm Oil Congress and Exhibition (PIPOC 2025)

Tempat : Kuala Lumpur Convention Centre, Malaysia

Website : <https://pipoc.mpob.gov.my/>

PEMERINTAH DORONG PERLAKUAN ADIL PADA KOMODITAS PERKEBUNAN DI TENGAH KEBIJAKAN EUDR

JAKARTA – Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera, menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia terkait penerapan kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR). Ia menilai kebijakan tersebut diskriminatif terhadap minyak sawit dan belum sepenuhnya siap diterapkan, baik oleh negara produsen maupun importir.

“Permasalahan utama bukan hanya kesiapan kita sebagai produsen, tetapi juga kesiapan negara-negara importir. Kebijakan seperti EUDR ini terasa diskriminatif, karena tidak diberlakukan secara setara terhadap minyak nabati lain,” ujar Dida disela Seminar Sawit yang diadakan Rumah Sawit Indonesia (RSI), dihadiri **InfoSAWIT** di Jakarta, pertengahan November 2024.

Dida mengusulkan agar kebijakan serupa diterapkan secara adil untuk komoditas minyak nabati lain, seperti kedelai, kanola dan Bunga matahari serta produk perkebunan lainnya. Hal ini, menurutnya, penting untuk memastikan perlakuan setara demi kepentingan petani kecil yang menjadi tulang punggung industri perkebunan Indonesia.

Ia juga menekankan perlunya penguatan dari sisi sosial dan politik dalam menghadapi kebijakan tersebut. “Banyak lahan perkebunan kita, seperti sawit dan kakao, dimiliki oleh rakyat dengan kapasitas yang berbeda dari perusahaan besar. Oleh karena itu, pemerintah harus membantu mereka, terutama dalam memenuhi standar sertifikasi seperti ISPO,” tambah Dida.



Dok. InfoSAWIT

Dida menjelaskan bahwa kebijakan seperti EUDR menciptakan tantangan baru, terutama bagi petani kecil yang kesulitan mendapatkan dukungan teknis dan finansial untuk memenuhi persyaratan sertifikasi. Namun, ia juga menekankan bahwa pemerintah telah mengambil langkah konkret untuk mendorong adaptasi, termasuk melalui program sertifikasi ISPO yang akan menjadi bagian dari strategi nasional.

“Kami akan memastikan bahwa sertifikasi ISPO dapat menjadi tulang punggung keberlanjutan industri perkebunan kita. Ini penting, tidak hanya untuk memenuhi tuntutan EUDR, tetapi juga untuk mendukung posisi Indonesia di pasar global,” katanya.

Dengan lebih dari 40% perkebunan sawit di Indonesia dimiliki oleh petani sawit kecil, Dida menegaskan pentingnya dukungan menyeluruh untuk memastikan keberlanjutan, keadilan, dan daya saing komoditas Indonesia di pasar internasional. “Kita harus memperjuangkan perlakuan setara untuk semua komoditas demi melindungi petani kita,” pungkasnya.

□ T2

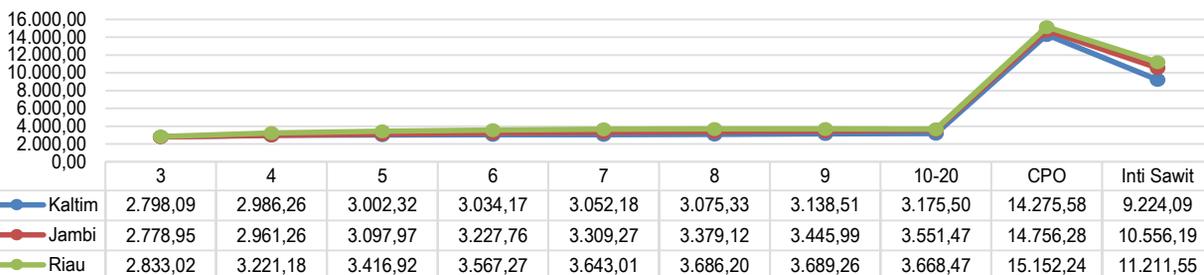
HARGA RATA-RATA CPO US\$ / TON (CIF ROTTERDAM) 1972-2024

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata
1972	193	177	210	227	215	-	210	219	225	224	215	210	211
1973	210	249	266	293	339	393	490	557	407	422	470	583	390
1974*	689	752	710	613	611	611	639	721	714	799	765	668	691
1975	552	461	450	438	378	332	387	452	417	410	395	-	425
1976	353	372	380	351	344	386	433	422	453	449	460	454	405
1977	462	507	598	647	659	619	520	493	460	450	445	501	530
1978	514	558	688	603	624	664	622	585	615	623	604	604	609
1979	636	694	637	666	665	675	678	652	640	602	620	630	650
1980	673	683	620	611	584	555	545	518	509	507	585	622	584
1981	635	640	620	588	599	640	600	531	509	513	500	483	572
1982	502	528	507	509	511	494	421	396	380	355	362	376	445
1983	372	367	378	419	432	394	425	559	645	671	661	695	502
1984*	875	875	845	841	951	783	580	562	611	615	616	592	729
1985	583	595	651	653	610	556	487	404	360	356	362	390	501
1986	342	283	243	242	238	243	221	197	207	272	303	293	257
1987	346	334	315	340	345	340	304	307	336	353	367	438	344
1988	487	408	381	403	423	495	512	451	425	430	411	407	436
1989	385	398	398	389	404	372	330	309	318	315	304	271	349
1990	280	273	285	265	279	272	279	292	279	289	331	340	289
1991	348	338	350	319	317	309	341	338	324	344	362	375	339
1992	387	382	396	401	391	402	381	382	391	396	413	401	394
1993	410	425	407	392	369	355	360	356	351	332	356	409	377
1994	403	387	395	434	487	507	496	393	612	615	705	723	513
1995*	655	659	687	625	611	633	656	615	585	614	608	589	628
1996	534	518	518	562	548	507	475	514	546	531	549	560	530
1997	567	579	558	562	554	532	498	505	524	544	557	560	545
1998	620	661	672	691	704	633	665	673	706	694	680	663	672
1999*	627	556	493	508	467	392	307	346	386	379	368	353	432
2000	348	331	350	368	324	317	313	308	287	255	259	268	311
2001	256	237	252	251	235	256	329	359	306	270	318	331	283
2002	336	332	337	347	372	408	405	424	400	411	440	463	390
2003	459	450	426	413	414	428	410	396	419	482	499	510	442
2004	495	531	548	537	513	437	428	431	435	426	432	423	470
2005	398	401	429	427	414	417	413	407	422	441	441	428	420
2006	422	442	437	434	440	440	471	511	497	505	542	583	477
2007	595	603	620	708	769	798	807	818	823	877	952	950	777
2008*	1.059,00	1.160,00	1.249,00	1.174,00	1.193,00	1.209,00	1.118,00	916,00	770,00	531,00	491,00	500,00	948,00
2009	554	571	592	694	791	718	638	721	673	679	721	781	678
2010	790	795	831	826	817	797	805	900	914	989	1113	1228	900
2011*	1.275,00	1.281,00	1.184,00	1.146,00	1.159,00	1.132,00	1.085,00	1.082,00	1.073,00	996,00	1.050,00	1.024,00	1.124,00
2012	1.061,00	1.109,00	1.148,00	1.180,00	1.094,00	998,00	1.015,00	997,00	967,00	839,00	813,00	776,00	1.000,00
2013	835	860	851	840	849	862	833	827	817	854	915	905	854
2014	863	905	953	906	893	857	840	760	704	720	724	679	817
2015	673	678	662	654	652	665	631	543	527	580	554	563	615
2016	559	643	687	685	644	682	651	730	754	718	681	790	691
2017	806	773	719	614	703	666	658	673	723	717	715	668	703
2018	675	667	681	663	656	629	587	559	548	514	474	491	595
2019	537	557	532	534	508	503	497	547	561	581	677	788	569
2020	820	721	613	555	526	589	660	695	734	748	852	954	706
2021	1.017,25	1.008,61	1.138,16	1.182,86	1.262,13	1.075,38	1.246,13	1.223,10	1.244,29	1.371,19	1.360,57	1.312,38	1.204,00
2022	1.344,13	1.519,21	1.830,24	1.707,76	1.690,75	1.579,17	1.236,43	1.074,32	1.047,73	1.034,43	1.104,89	1.002,02	1.347,59
2023	1.003,75	972,40	1.000,76	1.023,38	944,17	905,80	974,40	949,13	964,76	895,91	943,07	945,26	960,23
2024	950,8	979,52	1.071,00	1.066,07	1.009,62	1.037,63	1.033,04	1.066,93	1.151,67	1.265,76	1.305,48		

Sumber: Diolah Pusat Data Bisnis InfoSAWIT/2024

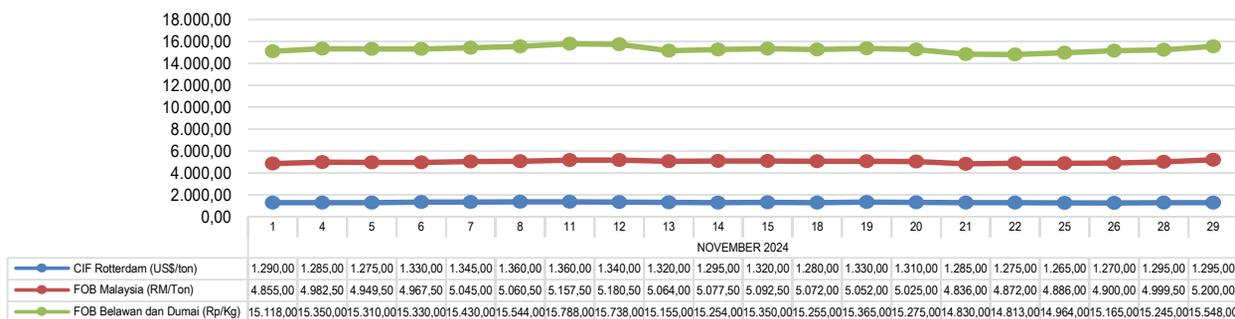


**Harga Refrensi Tandan Buah Segar (TBS) Indonesia
(Periode NOVEMBER - DESEMBER 2024)**

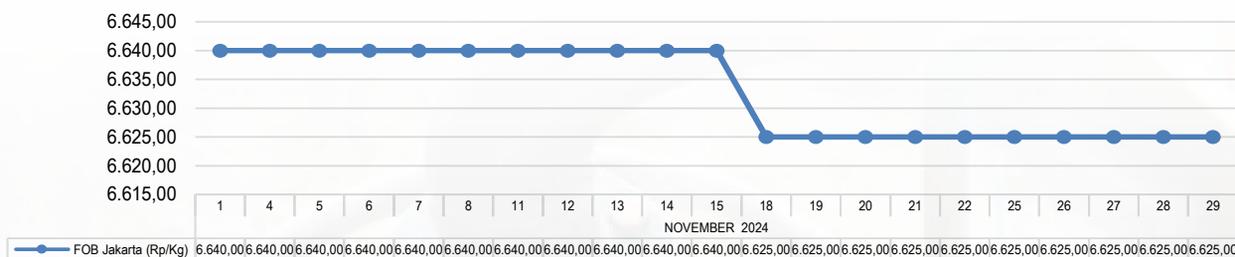


Provinsi Riau periode 7 Nov - 3 Des 2024 | Provinsi Jambi Periode 29 Nov - 5 Des 2024 | Provinsi Kalimantan Timur Periode II - November 2024

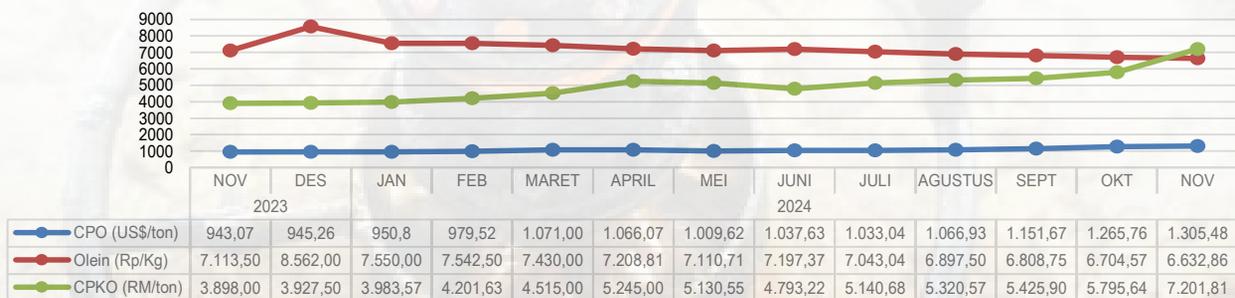
HARGA CPO NOVEMBER 2024



HARGA OLEIN NOVEMBER 2024



HARGA CPO, OLEIN & CPKO NOVEMBER 2023 - NOVEMBER 2024



Sumber : Berbagai sumber, dirangkum Pusat Data Bisnis InfoSAWIT, 2024.

Disclaimer:

InfoSAWIT berusaha semaksimal mungkin menyajikan data di halaman ini berdasarkan sumber yang benar dan dapat dipercaya. Namun, InfoSAWIT tidak menjamin semua data benar-benar akurat dan lengkap. Data tersebut disajikan semata-mata untuk memberikan informasi.



WE DON'T MAKE A HUNDRED THINGS.
WE MAKE ONE RADAR LEVEL SENSOR
(FOR EVERYTHING).

THE 6X[®]

Whatever you want to measure, whatever frequency you use – VEGAPULS 6X can handle it. Tell us your requirements, and we'll configure our newest radar sensor to suit your purpose. With VEGAPULS 6X, "Which radar sensor is the right one?" becomes irrelevant ... and your life just got so much simpler.

VEGA. HOME OF VALUES.

www.vega.com/radar

VEGA

InfoSAWIT®

INDONESIAN PALM OIL MAGAZINE

DOWNLOAD OUR E-MAGZ NOW !



www.infosawit.com
www.palmoilmagazine.com

Follow Us:



@infosawit



@infosawit



Majalah infosawit

Hotline Subscribe & Ads:
Hp: 0812 8729 9959 (Redaksi)
E-mail : marketing@infosawit.com
www.infosawit.com, www.palmoilmagazine.com